



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UNTUNG BASUKI**
2. Jabatan : **DIREKTUR PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS**
3. NHK : **128661**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.414.625.000**

1. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT ,
HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/162 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.030.500.000
3. Tanah Seluas 1.375 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL
SENDIRI Rp. 334.125.000
4. Tanah Seluas 95 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 612 m2/450 m2 di KAB / KOTA
CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/98 m2 di KAB / KOTA
BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 600.000.000**

1. LAINNYA, POLYGON, DAHON (3 BUAH SEPEDA) SEPEDA
Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
2. MOBIL, NISSAN X-TRAIL 2.5 AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
163.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO 125 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
9.000.000



4. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX TYPE V Tahun 2022, HASIL
SENDIRI Rp. 425.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	182.241.371
D. SURAT BERHARGA	Rp.	25.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	195.750.021
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.417.616.392
III. HUTANG	Rp.	1.454.403.590
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.963.212.802

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.